



BELA NEGARA

Electronic Book

KATA PENGANTAR

Bela negara adalah sebuah konsep tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara. Secara fisik dapat diartikan sebagai usaha pertahanan dari segala bentuk AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan) terhadap eksistensi negara tersebut. Secara non-fisik, bela negara dapat diartikan sebagai peran aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, dan lain sebagainya. Dengan demikian bela negara menjadi wajib untuk setiap profesi apapun.

Buku elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-book*, yang merupakan transformasi bentuk dari buku pada umumnya namun tidak mengubah sifat dan fungsinya. Dewasa ini *e-book* semakin diminati antara lain karena lebih mudah dibawa, tidak mudah dirusak, dan mudah didistribusikan. Terlebih ditengah pandemi *covid-19* sekarang ini, kita dianjurkan untuk melakukan *social distancing* dalam rangka memutus penyebaran virus corona, sebisa mungkin *stay at home* dan menjauh dari keramaian.

Mudah-mudahan *e-book* Bela Negara ini menjadi referensi tambahan bagi ASN Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten dan masyarakat Banten khususnya, serta seluruh komponen bangsa Indonesia pada umumnya.

**Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Banten,**


Drs. ADE ARIYANTO, M.Si
NIP. 19630216 198503 1 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
I. BELA NEGARA	
a. Sejarah Bela Negara	1
b. Definisi Bela Negara	3
c. Bela Negara Sebagai Kesadaran Menghadapi Segala AGHT	5
d. Nilai-Nilai dasar Bela Negara	7
1. Cinta Tanah Air	7
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara	8
3. Setia Kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara	9
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	10
5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara	11
6. Semangan untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur	12
II. KONSEP DAN PRINSIP KEPEMIMPINAN BELA NEGARA	
a. Konsep Kepemimpinan Bela Negara	18
b. Prinsip Kepemimpinan Bela Negara	22
III. AKTUALISASI KEPEMIMPINAN BELA NEGARA	
a. Mempengaruhi dan Mengarahkan Kecintaan Warga Negara kepada NKRI	26
b. Kesiediaan Membantu Kesulitan Masyarakat dan Kelompok .	29
c. Menjadi Teladan Warga Negara dalam Menjaga NKRI	31

IV. MEMBANGUN SEMANGAT BELA NEGARA BERBASIS

KESEJAHTERAAN 33

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya	13
--	----

I. BELA NEGARA

a. SEJARAH BELA NEGARA

Sejarah Bela negara dimulai di Kota Bukittinggi yang semula merupakan pasar (pekan) bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan Kaum Padri. Pada tahun 1825, Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan opsir-opsir Belanda yang berada di wilayah jajahannya. Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, kawasan ini selalu ditingkatkan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadsgemeente (kota) dan berfungsi sebagai ibu kota Afdeeling Padangsche Bovenlanden dan Onderafdeeling Oud Agam.

Pada masa pendudukan Jepang, Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kempetai, di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stadsgemeente Fort de Kock menjadi Bukittinggi Si Yaku Sho yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya seperti Sianok Anam Suku, Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukittinggi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad

Hasan. Pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukittinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara.

Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006. Untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI), pemerintah Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektare, tepatnya di Jorong Sungai Siriah, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat. Dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela negara Ke 65, pada tanggal 21 Desember 2013 Menteri Pertahanan saat itu (Purnomo Yusgiantoro) didampingi oleh Kabadiklat Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin dan Plt Dirjen Pothan Timbul Siahaan serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau pembangunan Monumen Nasional Bela Negara.

Menhan Purnomo Yusgiantoro berpesan dalam amanatnya *“pembangunan monumen ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk kelangsungan*

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini sebagai penghargaan dan pengingat serta pelajaran bagi generasi muda Indonesia untuk dijadikan contoh dalam memahami arti dari bela negara dan arti cinta tanah air”

b. DEFINISI BELA NEGARA

Bela negara adalah istilah *konstitusi* yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”. Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela Negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni : Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang merdeka dan

berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa.

Penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa “Upaya Bela Negara” adalah *“sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara”*. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa.

Oleh karena itu, secara definisi Bela Negara sendiri sebenarnya merupakan :

1. **Jiwa** kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara;
2. **Kewajiban** dasar manusia; dan
3. **Kehormatan** bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa, yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut menjelma menjadi “Upaya Bela Negara”.

**c. BELA NEGARA SEBAGAI KESADARAN MENGHADAPI
SEGALA AGHT**

Amanat tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara 2015, 19 Desember 2015 menegaskan bahwa Republik Indonesia bisa berdiri tegak sebagai negara dari seluruh kekuatan rakyat, mulai dari prajurit TNI, petani, pedagang kecil, nelayan, ulama, santri, dan elemen rakyat yang lain. Sejarah juga menunjukkan kepada kita semua bahwa membela negara tidak hanya dilakukan dengan kekuatan senjata. Dalam amanat tersebut dijelaskan beragam ancaman yang sedang dan akan dihadapi oleh Bangsa Indonesia, mulai dari tantangan dalam mengelola kemajemukan, gelombang perdagangan bebas dan tekanan integrasi ekonomi regional, hingga penguasaan akses sumber daya maritime, energi dan pangan, serta tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan.

Inpres No. 7 Tahun 2018, selaras dengan Amanat Tertulis Presiden RI Pada Peringatan Hari Bela Negara tersebut, menunjukkan bahwa bela negara menyangkut segala sector kehidupan dengan rencana aksi terkait sector pertahanan keamanan hingga social budaya. Adapun tujuan dari penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018 adalah dalam rangka menyelaraskan dan memantapkan Upaya Bela Negara menjadi lebih sistematis, terstruktur, terstandarisasi, dan masif.

Penerbitan Inpres No. 7 Tahun 2018, dengan demikian merupakan penegasan pentingnya bela negara untuk menghadapi segenap ancaman hingga tantangan mulai dari ranah pertahanan keamanan, mengelola

kemajemukan, hingga tantangan kemiskinan, keterbelakangan dan ketimpangan dalam menegakkan amanat kedaulatan negara bangsa. Selain itu, kehadiran Impres No. 7 Tahun 2018 juga merupakan penegasan kebijakan bahwa bela negara bisa dilakukan melalui mengabdikan profesi di berbagai bidang kehidupan masing-masing. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, hal ini sangat selaras dengan amanat Pasal 68 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asisi Manusia agar segenap warga negara dengan beragam kelebihan dan kekurangannya tetap dapat ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Nampak bahwa Inpres No. 7 Tahun 2018 menggenapi pemaknaan upaya bela negara dalam kaitannya dengan kedaulatan bangsa dan negara yaitu hak untuk menentukan nasib nusa, bangsa, dan negaranya sendiri. Kedaulatan bangsa dan negara tidak boleh hanya dimaknai dalam bidang pertahanan keamanan, wilayah, dan politik, namun juga di segenap bidang kehidupan nasional, mencakup hubungan internasional, kependudukan, sumber daya dan lingkungan, ideologi, hokum, ekonimi, social budaya, hingga IPTEK. Secara hakiki, dengan demikian Bela Negara merupakan manifestasi dari kesadaran segenap Bangsa dan Warga Negara Indonesia melalui jiwanya, kewajibannya, dan kehormatannya untuk mengdapi segala macam Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang ketika diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku, maka jiwa, kewajiban, dan kehormatan tersebut

menjelma menjadi “Upaya Bela Negara” atau yang oleh Inpres No. 7 Tahun 2018 dipertegas sebagai “Aksi Nasional Bela Negara”.

d. NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

1. Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi :

- Pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia
- Potensi sumber daya alam
- Potensi sumber daya manusia, serta
- Posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Dengan memahani keberadaan Indonesia seutuhnya, akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangga sebagai bangsa pejuang, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga,

melindungi dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional.

2. Sadar Berbangsa dan Bernegara

Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi :

- Wawasan Nusantara
- Ketahanan Nasional
- Kewaspadaan Nasional
- Dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan

handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGTH, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap sadar bela negara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman.

3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideology Pancasila.

Untuk membangun kesetiaan iap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengalaman nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi :

- Penegakkan disiplin
- Pengembangan etika politik, dan
- Sistem demokrasi, serta
- Menumbuhkan taat hukum.

Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan colonial belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan.

Untuk membangunkan sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi :

- Konsepsi jiwa;
- Semangat dan nilai juang 45 (JSN 45);
- Tanggung jawab etik;
- Moral dan konstitusi; serta

- Sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Dengan sikap rela berkorban demi bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal dan menyukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.

5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta upaya bela negara. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk AGHT melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni : aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideology, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan.

Sehubungan dengan perkembangan IPTEK dan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak berbagai bentuk AGHT yang

semakin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya sebagai wujud dari bela negara. Agar aksi bela negara dapat berhasil optimal perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk AGHT, sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional yang lebih efektif. Untuk memahami bentuk-bentuk AGHT di lingkungan masing-masing perlu melakukan analisis sederhana, dengan memerhatikan potensi yang ada termasuk kearifan lokal, dan ancaman faktual atau potensial, sehingga aksi bela negara sebagai solusi tiap masalah dapat berkembang dengan sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap bentuk AGHT akan menjadi gerakan nasional bela negara yang sangat potensial dan berdaya guna optimal membangun ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional.

6. Semangat untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur.

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni : melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban

dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka, berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia yang damai.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat kebangsaan merupakan energi potensial yang tinggi dari bangsa Indonesia dan akan berdaya guna secara efektif jika digunakan dengan semangat kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, ras, agama dan kelompok. Dengan semangat yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad yang membara akan mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber daya nasional dan kearifan lokal dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal merupakan rujukan nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk mendorong akselerasi pembangunan ketahanan nasional dan menyukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

Tabel 1.1
Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya

No	Nilai Dasar Bela Negara	Tercermin dalam sikap dan perilaku antara lain :
1	2	3
1.	Cinta Tanah Air	1. Mencintai, menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup 2. Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa 3. Menggunakan produk dalam negeri

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI 5. Menjaga nama baik bangsa dan negara 6. Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatisme kedaerahan.
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan 2. Menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan 3. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan 4. Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri 5. Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat 6. Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku
3.	Setia kepada Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar 2. Memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara

		<p>4. Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat</p> <p>5. Menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia</p> <p>6. Saling membantu dan tolong-menolong antar sesama sesuai nilai-nilai Luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan</p>
4.	Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara	<p>1. Rela menolong sesama warga negara masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya.</p> <p>2. Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan</p> <p>3. Menyumbangkan tenaga, pikiran kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara</p> <p>4. Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing</p> <p>5. Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara</p>

		6. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa pamrih
5.	Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara	<p>1. Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara</p> <p>2. Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masing-masing sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing.</p>
		<p>3. Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik.</p> <p>4. Memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi yang tinggi.</p>

		<p>5. Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman.</p> <p>6. Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumber daya alam dan keragaman hayati.</p>
6.	Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur	<p>1. Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <p>2. Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.</p> <p>3. Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat, Keadilan dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>4. Mempraktekkan <i>clean and Good Governance</i> dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</p> <p>5. Menerapkan Jiwa, semangat dan Nilai kejuangan 1945.</p> <p>6. Memanfaatkan kearifan lokal untuk kesejahteraan Rakyat.</p>

II. KONSEP DAN PRINSIP KEPEMIMPINAN BELA NEGARA

a. Konsep Kepemimpinan Bela Negara

Kepemimpinan bela negara adalah kepemimpinan yang dilandasi keteladanan dalam mengaktualisasikan nilai-nilai bela negara, yakni cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban, dan meyakini Pancasila sebagai ideology negara. Nilai-nilai tersebut telah ditandai sebagai atribut warga negara yang baik (*good citizenship*), sekaligus sebagai karakter yang akan menentukan kualitas kepemimpinan.

Keteladanan menjadi karakter pembentuk kualitas kepemimpinan beala negara. Meski turut dibentuk oleh atribut yang lain, karakter telah ditandai sebagai jiwa kepemimpinan yang penting. Setelah menyelidiki faktor-faktor kunci yang menentukan kepemimpinan Presiden Amerika yang dinilai hebat pada zamannya, Newell (tanpa tahun : 318) menyebut karakter sebagai salah satu faktor yang membentuk jiwa kepemimpinan, "*character trumps brains – or at least formal education*". Sebagai salah satu jiwa kepemimpinan, karakter dinilai lebih menentukan disbanding otak, atau sekurang-kurangnya pendidikan formal, dalam menentukan keberhasilan seorang pemimpin.

Keteladanan dalam kepemimpinan bela negara lahir dari integritas moral dan etika sang pemimpin. Integritas moral adalah konsistensi antara pikiran, ucapan dan tindakan dengan mendasarkannya pada kebenaran moral universal. Seperti diungkapkan Becker (1998) integritas "*is*

commitment in action to a morally justifiable set of principles and values”.

Jadi, integritas adalah komitmen untuk mendasarkan setiap tindakan pada seperangkat prinsip atau nilai moral secara konsisten. Konsistensi pemikiran, ucapan, dan tindakan seorang pemimpin menjadi teladan bagi pengikutnya. Keteladanan inilah yang menjadi kekuatan dalam menggerakkan pengikutnya meraih misi dan tujuan organisasi tanpa kenal menyerah.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bertens (2007:4), bahwa integritas adalah seperangkat prinsip atau nilai moral yang menjadi pedoman bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur perbuatannya. Nilai-nilai tersebut berasal dari perpaduan nilai agama, budaya dan ideology sebuah bangsa, sehingga menjadi acuan dan patokan bersama dalam melaksanakan suatu tindakan.

Oleh karena itu, pemimpin yang berintegritas akan menampilkan sekurang-kurangnya empat ciri berikut, yakni :

- 1) Konsisten dalam memegang prinsip
- 2) Memegang teguh nilai-nilai moral
- 3) Mampu menjadi teladan bagi pengikutnya, dan
- 4) Memiliki daya juang tak mengenal batas dalam memperjuangkan misi dan tujuan organisasinya.

Integritas melekat dalam tradisi relativisme moral, dimana pemaknaan dan pemahaman atas perilaku yang baik dapat bervariasi

ditengah-tengah kebudayaan, perbedaan zaman, serta perbedaan prinsip dan nilai. Oleh karena itu, integritas moral muncul sebagai komitmen untuk memegang teguh prinsip-prinsip moral universal, dan menolak untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi sangat sulit, serta banyak tantangan yang berupaya melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika yang dipegang teguh. Pribadi yang berintegritas tidak mudah menyerah pada keadaan, tidak mudah larut ke dalam iklim moral yang carut marut, serta tidak akan terjebak pada desakan kepentingan jangka pendek.

Transformasi politik dan kepemimpinan nasional telah mengubah banyak hal. Mulai dari struktur hingga kultur dan praktik politik. Arus perubahan yang berlangsung bukan hanya menyentuh aspek-aspek fisik, melainkan juga sistem pemikiran dan perilaku. Menghadapi perubahan dimaksud, penggalan konsep, prinsip dan aktualisasi kepemimpinan bela negara diyakini mampu menjadi salah satu solusi. Keyakinan ini dilandasi oleh fakta bahwa bela negara telah menjadi konsep yang menyatukan seluruh kekuatan bangsa dalam melahirkan Indonesia merdeka, mempertahankan diri dari kekuatan asing yang bermaksud merongrong, dan menjadi kekuatan yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya.

Makna konseptual kepemimpinan bela negara bisa dilacak secara historis, yuridis dan sosiologis. Secara historis, kepemimpinan bela negara dapat dilihat dari sejarah panjang perjuangan segenap rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan mengisinya. Kemerdekaan yang

didapat dengan mengorbankan harta, jiwa dan raga tiada lain dilaksanakan atas dasar kecintaan terhadap nusa dan bangsa demi mewujudkan Indonesia merdeka, yang berdaulat, adil, dan makmur.

Secara yuridis kepemimpinan bela negara dapat dipahami sebagai aktualisasi bela negara sebagaimana tertuang di dalam UUD NRI Tahun 1945 dan ketentuan perundangan lainnya. Memahami kepemimpinan dalam konteks bela negara berimplikasi pada perluasan orientasi kepemimpinan. Kepemimpinan tidak berorientasi jangka pendek, partisan, atau sectoral, tetapi merupakan bentuk kontribusi fungsional warga negara kepada masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Secara sosiologis kepemimpinan bela negara adalah kontekstualisasi keteladanan dalam pengamalan nilai-nilai bela negara sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan zaman, nilai-nilai dasar tidak boleh berubah sejauh tidak bertentangan dengan nilai dasarnya.

Contoh yang autentik dapat ditemukan di sekitar peristiwa Sumpah Pemuda. Seperti diketahui, Kerapatan Besar Pemuda II 28 Oktober yang melahirkan ikrar Sumpah Pemuda di gelar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Padahal, banyak aktivis pemuda tidak bisa berbicara dalam Bahasa ini. Bahkan pimpinan siding, Soegondo, dinilai tidak mampu mengucapkannya dengan baik. Tokoh lain yang saat itu tidak bisa berbicara Bahasa Indonesia adalah Sri Soendari (adik Dr. soetomo). Namun

kecintaannya pada Indonesia telah membuat Sri Soendari belajar keras, sehingga dua bulan kemudian, tepatnya saat berpidato pada Kongres Perempuan Indonesia Desember 1928 Sri Soendari telah mampu menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik (Yudi, Latif : 2014). Apa yang memotivasi Sri Soendari belajar keras hingga dalam dua bulan mampu berbicara Bahasa Indonesia? Sebagai pemimpin pergerakan perempuan Indonesia, Sri Soendari ingin menggerakkan aktivis perempuan dengan kekuatan keteladanan.

Dalam konteks mikro, sebagian aktivis mahasiswa menunjukkan kemandiriannya dalam mendanai aktivitas kemahasiswaannya dengan mengumpulkan dana berbasis kejujuran. Mereka menjual makanan di kampus, dimana pembeli mengambil sendiri barang dan menaruh uangnya. Selain memenuhi kebutuhan organisasi, kegiatan dana usaha (danus) seperti ini dikembangkan karena didorong keprihatinan atas meluasnya praktik tidak jujur dan melemahnya nilai kemandirian.

Meskipun konteks kepemimpinan berubah, nilai dasar yang melandasi kepemimpinan bela negara tidak bergeser. Kepemimpinan bela negara berlandaskan pada integritas moral dan etika yang menjadikan seorang pemimpin tampil sebagai teladan.

b. Prinsip Kepemimpinan Bela Negara

Prinsip utama kepemimpinan bela negara adalah integritas moral dan etika. Integritas moral dalam kepemimpinan bela negara akan

menghadirkan sosok pemimpin yang menjadi teladan. Keteladanan inilah yang memberinya legitimasi moral dalam mengarahkan dan mewujudkan kecintaan warga negara kepada NKRI.

Integritas moral kepemimpinan bela negara menghadirkan pemimpin yang memberi pengaruh bukan karena gemar memerintah, tajam dalam mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, melainkan pemimpin yang memberikan pengaruh karena tindakannya tidak tercela dan daya juangnya yang tak mengenal batas. Integritas moral dan etika sebagai prinsip kepemimpinan bela negara akan menciptakan iklim dimana orang akan terbiasa melakukan hal-hal yang benar, bukan membenarkan hal-hal yang biasa dilakukan.

Integritas juga dikonsepsikan sebagai kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral. Perilaku orang yang berintegritas akan sesuai dengan nilai-nilai maupun prinsip-prinsip yang dipegangnya.

Dengan demikian kepemimpinan bela negara pada intinya adalah kepemimpinan yang memberi pengaruh bukan karena hanya pandai menginstruksi, hebat mengkritik, dan mahir mencari kesalahan, melainkan kepemimpinan yang memberikan pengaruh dengan perilaku-perilaku yang dianggap baik oleh masyarakat. Adapun perilaku yang dianggap baik tersebut adalah segala perilaku yang dilandasi oleh integritas etika dan moral.

Berkaca pada sejarah, kepemimpinan Soekarno lahir dari kepekaan jiwanya dalam melihat kondisi masyarakat Indonesia yang terjepit oleh penjajahan dan penindasan. Kepekaan terhadap penderitaan masyarakat itulah yang membuat Soekarno berpikir visioner untuk menembus batas kemampuan dan mencita-citakan sebuah bangsa yang merdeka dan lepas dari ketertindasan. Konsistensi pemikiran, ucapan dan tindakan Soekarno tentang konsep kemerdekaan mampu menjadi kekuatan yang mempengaruhi seluruh elemen bangsa untuk bergerak bersama dalam melawan penjajahan/penindasan demi satu harapan bersama, yaitu Indonesia Merdeka.

Begitu pula dengan sosok Muhammad Hatta, yang konsisten dalam pemikiran dan kebijakannya mengenai sistem perekonomian bangsa Indonesia. Kondisi rakyat Indonesia yang masih terbelakang pada waktu itu, memunculkan gagasan dan serangkaian kebijakan dalam mencerdaskan dan memperbaiki kesejahteraan ekonomi rakyat berlandaskan semangat kekeluargaan dan mewujudkan dalam gerakan koperasi.

Kepemimpinan bela negara yang dibutuhkan saat ini dapat digambarkan sebagai pemimpin yang konsisten dengan keyakinan moralnya, berani karena benar, mampu memaksimalkan pendengarannya untuk menampung aspirasi dan keluhan rakyat, menggunakan tangan dan kakinya untuk beraksi membantu kesulitan-kesulitan rakyat, mencurahkan segala pikirannya untuk kepentingan rakyat, dan memiliki daya juang tanpa

batas dalam mewujudkan kebaikan bersama. Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam artikelnya (2016) menyatakan bahwa “sesungguhnya rakyat menginginkan pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena menurut hukum”. Figure pemimpin seperti inilah yang akan membuat rakyat merespon dengan sukarela untuk bergerak bersama pemimpinnya dalam mencapai visi Indonesia yang adil dan makmur dalam wadah NKRI.

Masyarakat menjadi “medaan pengabdian” bagi kepemimpinan bela negara, karena perannya harus mampu mempengaruhi dan mengarahkan kecintaan warga negara kepada NKRI. Hal itu sesuai dengan modal dasar dalam sebuah kepemimpinan, yaitu menyebarkan pengaruh bagi lingkungan masyarakat sekitarnya.

Kepemimpinan bela negara laebih daripada sekedar kepemimpinan biasa. Kepemimpinan Bela Negara bukan hanya mensyaratkan kompetensi, tetapi juga keberpihakan terhadap kepentingan dan kebaikan bersama.

Tantangannya adalah bagaimana menghadirkan sosok pemimpin berintegritas, loyal pada kebijakan negara yang fundamental, memiliki daya juang tanpa batas, dan mampu menghindarkan diri dari perilaku tercela. Meski kepemimpinan nasional saat ini lahir dari partai politik, namun mereka yang menyadari prinsip kepemimpinan bela negara akan mampu

keluar dari dilemma partisan, jebakan kepentingan primordial, dan orientasi jangka pendek.

III. AKTUALISASI KEPEMIMPINAN BELA NEGARA

Aktualisasi kepemimpinan bela negara dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

a. Memengaruhi dan Mengarahkan Kecintaan Warga Negara kepada NKRI

Pemimpin hadir untuk menjadi mesin utama yang menggerakkan anggota di lingkungannya. Kepemimpinan bela negara harus menjadi poros penggerak masyarakat lainnya untuk mencintai NKRI. Langkah implementatif untuk menjadi penggerak berlandaskan kekuatannya dalam menunjukkan preferensi ke-Indonesia-an.

Menjadi pengajak dan penggerak tak akan mampu terlaksana jika pemimpin itu sendiri tak mengetahui bagaimana makna cinta terhadap NKRI. Konsep kecintaan terhadap bangsa dan negara itu sering diterjemahkan sebagai nasionalisme. Istilah nasionalisme sudah sangat sering kita temui baik di media sosial, media cetak maupun dalam media lainnya. Secara harfiah, nasionalisme ialah paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi warga negara harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau *nation state*. Nasionalisme juga mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa, atau memelihara kehormatan bangsa.

Nasionalisme dalam makna persatuan dan kesatuan merupakan bentuk sebuah kesadaran keanggotaan di suatu bangsa yang secara potensial atau actual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, kemakmuran dan kekuatan bangsa. Sikap-sikap tersebut hadir karena dalam jiwa nasionalisme tertanam sebuah keinginan untuk membangun negara sesuai dengan cita-cita, harapan, dan kemampuan bangsa sendiri.

Aktualisasi nasionalisme dalam kepemimpinan bela negara akan tercermin dari pola ucap, pola sikap, dan pola tindak sang pemimpin yang menunjukkan preferensi yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. Preferensi demikian merupakan perwujudan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia tanpa merendahkan bangsa lain.

Kehadiran pemimpin bela negara sangat diperlukan dalam mengarahkan warga negara untuk memiliki kecintaan terhadap NKRI. Melalui integritas kepemimpinan bela negara, diharapkan kita mampu memberikan berbagai pengaruh baik bagi seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita untuk bersedia mencintai satu negara yang dipijaknya, tak lain adalah Indonesia.

Nasionalisme menjadi sikap yang sangat penting untuk dibina dan ditumbuhkan oleh kepemimpinan bela negara. Sebagai bangsa yang multikultural dan majemuk, Indonesia sangat rentan terhadap konflik

perbedaan. Hal tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri masyarakat majemuk yang diungkapkan oleh Pierre L. van den Berghe (dalam Nasikun 2012: 40-41) sebagai berikut, yaitu :

- Terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki sub kebudayaan yang berbeda satu sama lain;
- Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non komplementor;
- Kurang mengembangkan konsensus diantara para anggotanya terhadap nilai-nilai yang bersifat dasar;
- Secara relative seringkali mengalami konflik-konflik diantara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya;
- Secara relative integrase sosial tumbuh diatas paksaan (*coercion*) dan ketergantungan didalam bidang ekonomi;
- Dan masyarakat Indonesia yang majemuk ini sangat rentan mangalami disintegrasi.

Kepemimpinan bela negara menjadi salah satu faktor penentu terciptanya sebuah kekuatan dalam membangun sikap kewaspadaan nasional serta nasionalisme masyarakat. Pemimpin bela negara berperan strategis dalam menjalankan tugasnya untuk membuat warga negara semakin mencintai NKRI dan memiliki kewaspadaan nasional. Kecintaan terhadap NKRI atau yang disebut dengan nasionalisme memiliki garis lurus dengan visi dari kepemimpinan bela negara.

Nasionalisme warga negara harus sesuai dengan tantangan zaman. Hal itu menjadi penting agar nasionalisme dapat dimaknai secara lebih mendalam, tidak sekadar konsep pajangan. Karenanya, visi kepemimpinan bela negara ialah harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk menjadi warga negara yang memiliki rasa nasionalisme modern.

Menumbuhkan rasa nasionalisme melalui kepemimpinan bela negara merupakan upaya yang efektif dalam menciptakan masyarakat yang nasionalis. Semangat nasionalisme akan menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan, ketentraman dan keamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan beragam perbedaan.

b. Kesiediaan Membantu Kesulitan Masyarakat dan Kelompok

Kunci dalam memahami konsep masyarakat adalah interaksi sosial yang dibangun sesuai dengan norma adat istiadat mereka. Karenanya, seorang pemimpin yang memiliki jiwa bela negara, terjun langsung dan membaaur ke dalam interaksi sosial masyarakat menjadi syarat utama. Kepemimpinan bela negara harus mampu memasang telinga dan kepekaan hatinya ditengah-tengah kehidupan dan permasalahan masyarakat. Seorang pemimpin tak boleh mengambil jarak dengan masyarakat, menuntut dilayani selayaknya raja dan mengonsepsikan masyarakat hanya sebagai hamba.

Interaksi seorang pemimpin bela negara menjadi modal penting agar dapat menolong masyarakat. Ia harus mampu berinteraksi sesuai dengan etika moral yang berlaku dalam masyarakatnya. Pemimpin yang gagal dalam melakukan hal tersebut, justru akan ditolak oleh masyarakat karena tidak terjalin interaksi yang harmonis. Padahal, interaksi merupakan sarana untuk mendengar pendapat masyarakat, sekaligus mengajak mereka untuk bergerak bersama-sama menuju visi perubahan masa depan Indonesia yang lebih cemerlang.

Interaksi seringkali menjadi sumber masalah yang justru dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah bisa muncul karena arogansi pimpinan yang memaksakan gaya komunikasinya tanpa mempertimbangkan kehendak masyarakatnya. Harus terjalin komunikasi dua arah (*two way communication*) yang partisipatif agar tercipta saling pengertian diantara dua pihak.

Kita bisa belajar dari kepemimpinan Tjokroaminoto yang mengasuh para pendiri bangsa di rumahnya sendiri, membuat kelompok diskusi, memberikan ilmu dan etika, kehidupan berperi-kemanusiaan, strategy politik kepada orang-orang muda. Dari asuhannya lahirlah Sang Proklamator Soekarno. Soekarno tumbuh sebagai pemimpin yang bergerak di akar rumput, mendidik masyarakat lewat bulletin Fikiran Ra'jat, mengadvokasi masyarakat hingga ia dipenjarakan, mempelajari kebhinnekaan saat diasingkan di Ende, hingga mewakili bangsanya dalam proklamasi kemerdekaan.

Pemimpin yang tidak memiliki jiwa melayani dan membantu masyarakat tidak akan berani memutuskan perubahan memental bangsanya ke arah yang lebih baik lagi. Hal itu disebabkan posisi dan orientasi kepemimpinan yang bukan lagi sebagai pelayan publik, tapi sebagai raja yang ingin dilayani publik. Publik terus dimanfaatkan mulai dari suaranya dalam pemilu hingga digerogeti haknya dalam kehidupan sipil.

Kunci integritas kepemimpinan yang dibutuhkan masyarakat saat ini dapat terangkum dalam konsep “pemimpin kuat yang merakyat”. Hal itu artinya, pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyatnya, gemar berdialog, terbuka dengan perubahan dan hal-hal yang baru, serta tentunya memiliki empati dan kepekaan yang tajam dalam melihat sekaligus menerawang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Indonesia tak lagi membutuhkan pemimpin yang hanya simbolik tanpa memiliki esensi kepemimpinan sejati. Pemimpin bukan lagi seseorang yang pandai berdebat, pandai berwacana dalam janji-janji politik, tetapi pemimpin yang berbuat nyata. Pemimpin bela negara bukan lagi hanya soal IQ semata, tapi karakter yang kuat untuk melakukan perubahan yang signifikan.

c. Menjadi Teladan Warga Negara dalam Menjaga NKRI

Masyarakat sebagai komponen penting dalam bernegara memerlukan sosok yang mampu mengharmoniskan tujuan negara dengan kepentingan-kepentingan masyarakat. Membangun kebersamaan di dalam makna tentang kehidupan berbangsa menjaga agenda penting

kepemimpinan bela negara karena banyak negara terpecah belah akibat diorientasi elit dan warganya.

Hadirnya sosok pemimpin panutan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menjadi salah satu jawaban untuk bisa mengarahkan warganya pada tujuan negara, salah satu diantaranya ialah menjaga keutuhan NKRI. Keteladanan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk *learning from the example* atau *leadership by example*.

Keteladanan bukan dicitrakan atau dihafalkan, melainkan dibentuk melalui proses yang panjang. Keteladanan muncul dari karakter yang dimiliki oleh pemimpin tersebut. Karakter merupakan lukisan sang jiwa; cetakan dasar kepribadian seseorang/sekelompok orang, yang terkait dengan kualitas-kualitas moral, integritas, ketegaran serta kekhasan potensi dan kapasitasnya, sebagai suatu proses pembudayaan dan pelaziman (Latif, Yudi: 2004). Sedangkan Dewantara (1962: 25) mengungkapkan istilah “Karakter, watak, budi pekerti” sebagai sebuah kebulatan jiwa manusia atau bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan yang selalu menimbulkan tenaga.

Pemimpin dengan karakter yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa seperti jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, percaya diri, visioner dan bijaksana, akan mampu menjadi model panutan atau

keteladanan dalam masyarakat. Integritas inilah yang membuat pemimpin diikuti dan diteladani.

Kepemimpinan bela negara harus dimaknai sebagai bentuk kepemimpinan yang mencerminkan nilai-nilai luhur karakter bangsa yang diimplementasikan melalui perkataan, sikap serta perbuatan. Dengan demikian, dalam konteks kepemimpinan bela negara seorang pemimpin bukan hanya bagian dari komunitasnya, melainkan orang terbaik diantara pengikutnya, sekaligus sosok yang paling mampu menampilkan nilai-nilai yang diidamkan pengikutnya, seperti rela berkorban, berani memutuskan, cinta tanah air, kerja sama dan tanggung jawab, memiliki daya juang, serta menjaga persatuan dan kesatuan.

IV. MEMBANGUN SEMANGAT BELA NEGARA BERBASIS KESEJAHTERAAN

Selama berabad-abad suku bangsa Indonesia hidup sejahtera dengan menikmati kekayaan negeri berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di nusantara. Komoditas tersebut tidak saja memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi juga untuk diekspor seperti rempah-rempah, gula, nila, kayu gaharu, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tumbuhan tanah negeri tercinta layak disebut sebagai **Emas Hijau**.

Bangsa Indonesia juga harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dianugerahi laut yang luas sebagai sumber kekayaan yang melimpah dan menjadikannya sebagai salah satu bangsa maritime terbesar di dunia. Di dalam lautan yang terbentang luas dalam teritori Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hidup berbagai jenis fauna yang memiliki nilai ekonomi tinggi. *United Nations Development Programme* (UNDP) bahkan menyebut perairan Indonesia sebagai habitat bagi 76 persen terumbu karang dan 37 persen ikan karang dunia. Tak pelak lagi, laut Nusantara yang memberikan kontribusi besar bagi perikanan dunia. Kekayaan laut ini dapat disebut **emas biru** karena merupakan keunggulan komparatif suku bangsa Indonesia.

Selain air laut, curah hujan yang tinggi menyebabkan terjadinya banyak sungai di hamparan tanah bumi pertiwi. Sejak masa kehidupan nenek moyang kita hingga sekarang sungai-sungai tersebut dimanfaatkan sebagai prasarana transportasi dan untuk mengairi sawah. Sejalan dengan perkembangan teknologi, beberapa sungai dimanfaatkan untuk membangun Pusat Listrik Tenaga Air atau PLTA. Selain itu, dikombinasi dengan keindahan alam di sekitarnya, sungai-sungai tersebut dan danau-danau telah dan prospektif dijadikan objek wisata untuk dinikmati pengunjung dari dalam negeri dan manca negara, yang juga akan memberikan manfaat berupa kesejahteraan sosial bagi rakyat Indonesia.

Perjalanan sejarah kehidupan baik pada tataran nasional maupun internasional telah memberikan banyak bukti nyata yang terbantahkan betapa kearifan dan keunggulan lokal yang dimiliki telah mampu mengantarkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Kedua faktor tersebut dikombinasikan dengan ketersediaan serta kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia yang

melimpah, merupakan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa khusus kepada bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, patut dan wajib bangsa Indonesia mensyukuri, memelihara, mempertahankan dan memanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

Bukti-bukti tersebut bahkan telah melahirkan kepercayaan dan keseganan bangsa lain kepada bangsa Indonesia di kancah pergaulan dunia. Namun tidak sedikit bangsa lain di dunia dengan berbagai cara, tertarik melemahkan dua warisan nenek moyang tersebut untuk merebut dan menguasai kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, berbagai aspek kehidupan manusia di muka bumi maju, berubah serta berkembang dengan cepat dan tidak terprediksi dengan membawa dampak positif dan negative.

Sebaliknya, tidak arif dalam mengadopsi dan mengadaptasi nilai-nilai dan unsur-unsur baru, baik yang lahir dari dalam maupun datang dari luar, justru akan mendorong bangsa Indonesia meninggalkan kearifan lokalnya dan melupakan keunggulan lokal yang dimilikinya. Dalam konteks ini, perlu pula diwaspadai nilai-nilai dan produk-produk asing yang dengan sengaja disusupkan oleh bangsa lain yang ingin menghapuskan eksistensi bangsa Indonesia.

Rasa syukur bangsa Indonesia atas karunia tanah air yang sangat berharga tersebut oleh Tuhan Yang Maha Esa oleh banyak seniman

diekspresikan dalam lirik lagu. Bahkan Wage Rudolf Sumratman, menempatkan istilah tanah airku pada bait pertama dan di beberapa bait berikutnya pada stanza pertama lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Lebih dari itu, dalam lirik lagu Indonesia Raya ketiga stanza, kita bangsa Indonesia memuji kesuburan dan kekayaan tanah air sebagai pusaka. Oleh karena itu perlu dihayati bahwa :

- Nilai yang terkandung dalam sila pertama dari Pancasila, bangsa Indonesia harus memandang kekayaan yang melimpah berupa emas hijau, emas biru serta kekayaan alam lainnya yang merupakan keunggulan komparatif, merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang khusus diberikan kepada kita.
- Kekayaan tanah air itu merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang kita, oleh sebab itu harus dijaga dan dikelola secara bijaksana dengan menerapkan kearifan lokal agar dapat diwariskan kepada anak cucu generasi penerus kita.
- Bab XIV pasal 33 ayat 3 dari UUD 1945 mengamanatkan agar semua kekayaan yang terkandung di bumi nuanantara harus dikuasai oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
- Kemakmuran rakyat Indonesia merupakan tujuan didirikannya NKRI sebagaimana diamanahkan dalam sila ke lima dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh

rakyat Indonesia, yang berkeadilan sebagai penghayatan sila kedua dari Pancasila.

- Rakyat yang sejahtera dan makmur memiliki kebanggaan sebagai bangsa yang berdaulat atas negaranya. Artinya mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan salah satu mentuk bela negara. Oleh sebab itu, kita harus menjadi pandu ibu pertiwi yang menjaga kedaulatan dan kekayaan tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

A. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 Tentang
Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Aksi Nasional Bela
Negara

B. BUKU-BUKU

- Gintings, Abdorakhman. dkk. 2018. Modul I Konsepsi Bela Negara.
Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Gintings, Abdorakhman. dkk. 2018. Modul II Implementasi Bela Negara.
Jakarta: Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Komando Daerah Militer III Siliwangi. 2005. *Himpunan Materi Pelajaran
Melalui Penataran PPBN Prov. Banten TA.2005*. Serang:
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten.